

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Wisata dan Kaitannya dengan Pariwisata Berkelanjutan

Menurut UU No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Pasal 1 Ayat 3, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah (Republik Indonesia, 2009). Indonesia memiliki keindahan alam yang melimpah yang menjadikannya sangat berpotensi untuk industri pariwisata. Adapun industri pariwisata kini diarahkan menuju pembangunan yang berkelanjutan dikarenakan oleh kebijakan pembangunan pariwisata yang mengutamakan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk jangka waktu panjang (Musaddad dkk., 2019).

Contoh nyata peralihan pariwisata ke arah yang berkelanjutan dapat dilihat dari perkembangannya yang dinilai berdampak serius secara negatif bagi lingkungan alam. Oleh karena, itu muncullah konsep ekowisata berbasis alam yang berfokus pada bentuk wisata yang ramah terhadap kelestarian alam dan budaya. Pada hakikatnya, ekowisata tidak hanya bertujuan melestarikan lingkungan, tetapi juga dirancang sebagai destinasi wisata yang mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal (Mu'tashim & Indahsari, 2021). Konsep ekowisata ini sendiri merupakan bagian dari upaya pariwisata yang berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan dibutuhkan karena mengusung prinsip pemenuhan kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan-kebutuhan generasi di depannya. Beberapa aspek yang mempengaruhi pembangunan berkelanjutan sekaligus mendasari pariwisata berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1. Aspek Ekonomi: berkaitan dengan memaksimalkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan ekonomi secara jangka panjang dengan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien.
2. Aspek Sosial: berkaitan dengan stabilitas penduduk, pemenuhan kebutuhan dasar, pelestarian budaya, partisipasi masyarakat, pemerataan manfaat pembangunan, serta penghargaan terhadap hak asasi manusia.
3. Aspek Lingkungan: berkaitan dengan upaya meminimalkan sampah dan kerusakan lingkungan, meningkatkan kepedulian terhadap sumber daya alam, serta melindungi moral alam yang penting bagi keberlanjutan.

Dalam Piagam Pariwisata Berkelanjutan yang dikeluarkan pada tahun 1995, disebutkan bahwa “Pembangunan pariwisata harus didasarkan pada kriteria keberlanjutan yang artinya bahwa pembangunan dapat didukung secara ekologis dalam jangka panjang sekaligus layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat.” Isi piagam ini juga mencerminkan prinsip-prinsip yang diusung konsep pembangunan berkelanjutan, berikut adalah prinsip-prinsipnya:

1. Partisipasi: masyarakat lokal berperan sebagai pengawas dan menentukan visi pariwisata setempat yang disertai dengan strategi yang relevan untuk diimplementasikan.
2. Keikutsertaan Para Pelaku/*Stakeholder Involvement*: para pelaku pariwisata (seperti pemerintah daerah, kelompok sukarelawan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan lainnya) harus ikut serta dalam pembangunan.
3. Kepemilikan Lokal: pembangunan pariwisata harus bermanfaat bagi masyarakat lokal dengan membuka lapangan kerja yang berkualitas bagi masyarakat setempat.
4. Penggunaan Sumber Daya yang Berkelanjutan: kegiatan pariwisata harus memastikan bahwa sumber daya alam dan buatan yang digunakan dapat dipelihara dengan baik.
5. Mewadahi Tujuan-tujuan Masyarakat: sebaiknya keinginan dan tujuan masyarakat dapat terwujud melalui kegiatan pariwisata ini karena masyarakat setempatlah yang paling mengenal wisata lokal yang menjadi lingkungan kehidupan mereka juga.
6. Daya Dukung: daya dukung fisik, alami, sosial dan budaya harus turut dipertimbangkan agar tidak melebihi kapasitasnya.
7. Monitor dan Evaluasi: diperlukan adanya pedoman terkait indikator dan batasan yang mengukur dampak pariwisata.
8. Akuntabilitas: para pelaku pariwisata harus memastikan tidak ada sumber daya yang dieksploitasi secara tidak bertanggung jawab.
9. Pelatihan: pembekalan masyarakat setempat perlu dilakukan agar eksekusi rencana pariwisata menjadi tepat sasaran.
10. Promosi: memperkuat identitas lokal dan menghadirkan pengalaman wisata yang berkualitas.

(Kurniawati, 2013)

Berikut adalah jenis-jenis pariwisata menurut UNWTO (United Nations World Tourism Organization):

A. Jenis pariwisata berdasarkan aspek geografis:

1. Pariwisata Domestik (*Domestic Tourism*): Kegiatan berwisata yang dilakukan seseorang di dalam wilayah negaranya sendiri, tanpa melewati perbatasan internasional.
2. Pariwisata Masuk (*Inbound Tourism*): Aktivitas wisata yang dilakukan pengunjung dari luar negeri ketika mereka datang ke suatu negara dan melakukan perjalanan di dalamnya.
3. Pariwisata Keluar (*Outbound Tourism*): Perjalanan wisata yang dilakukan penduduk suatu negara ke luar negeri, baik untuk liburan, bisnis, atau tujuan lainnya.

B. Kategori tambahan hasil penggabungan jenis pariwisata geografis:

1. Pariwisata Dalam Negeri (*Internal Tourism*): Merupakan gabungan antara wisata domestik dan *inbound*, meliputi seluruh aktivitas wisata yang dilakukan baik oleh warga lokal maupun wisatawan mancanegara di dalam batas negara tersebut.
2. Pariwisata Nasional (*National Tourism*): Gabungan antara wisata domestik dan *outbound*, mencakup perjalanan yang dilakukan penduduk suatu negara, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.
3. Pariwisata Internasional (*International Tourism*): Meliputi perjalanan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara ke luar negeri, serta perjalanan wisata yang dilakukan oleh orang asing ke dalam negara tersebut.

C. Jenis pariwisata berdasarkan tujuan perjalanan:

1. Wisata hiburan dan rekreasi (*leisure tourism*)
2. Perjalanan bisnis dan profesional
3. Mengunjungi keluarga atau kerabat (*Visiting Friends and Relatives/VFR*)
4. Wisata kesehatan dan medis
5. Perjalanan religius dan ziarah
6. Wisata belanja atau perjalanan singkat
7. Transit (persinggahan tanpa menginap)

8. Kegiatan sukarela, diplomatik, dan kategori lainnya

D. Jenis pariwisata berdasarkan durasi:

1. Wisatawan kunjungan singkat (*same-day visitors/excursionists*): Wisatawan yang berkunjung tanpa bermalam.
2. Wisatawan menginap (*tourists/overnight visitors*): Wisatawan yang menghabiskan minimal satu malam di destinasi.

2.2. Indikator Pariwisata Berkelanjutan menurut Beberapa Ahli

2.2.1. South Australian Tourism Commission

South Australian Tourism Commission (SATC) merupakan lembaga pemerintah negara bagian Australia Selatan yang bertanggung jawab dalam pengembangan, promosi, serta pengelolaan sektor pariwisata. Didirikan berdasarkan *South Australian Tourism Commission Act 1993*, lembaga ini bertujuan untuk mendukung tercapainya manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat Australia Selatan melalui promosi daerah lokal sebagai destinasi pariwisata, termasuk dengan memperkenalkan berbagai acara dan festival serta mendorong pengembangan dan peningkatan industri pariwisata setempat (South Australian Tourism Commission, 2020).

SATC telah menerbitkan sebuah buku berjudul “Design Guidelines for Sustainable Tourism Development” pada tahun 2007. Buku pedoman ini ditujukan terutama bagi pengembang produk wisata baru, pelaku industri pariwisata yang ingin melakukan peningkatan atau pembaruan, arsitek beserta konsultan perancang bangunan, dan perencana di tingkat pemerintah daerah maupun negara bagian yang terlibat dalam penyusunan kebijakan tata ruang serta penilaian permohonan pengembangan. Adapun pedoman ini tidak dimaksudkan sebagai pengganti konsultan profesional, melainkan sebagai bantuan kepada pengelola proyek untuk memahami isu yang ada, memberikan arahan kepada para profesional, serta meninjau hasil pekerjaan mereka (South Australian Tourism Commission, 2007). Berikut adalah aspek-aspek penilaian pariwisata berkelanjutan berdasarkan buku tersebut:

Tabel 2.1 Indikator Pariwisata Berkelanjutan menurut Standar SATC

No.	Kategori	Isu	Sasaran
1.	Lingkungan	Lahan (hidrologi, tanah, vegetasi, fauna, perlindungan kebakaran, topografi)	Meminimalkan perubahan terhadap sistem alam serta menjaga ekosistem tetap berfungsi.

		Energi (desain pasif, peralatan mekanis, energi terbarukan, energi terkandung)	Menggunakan desain hemat energi, memaksimalkan energi terbarukan, dan mengurangi emisi serta biaya operasional.
		Material	Memilih material yang berkelanjutan, lokal, memiliki energi terkandung rendah, serta ramah lingkungan.
		Air	Menghemat, mendaur ulang, dan menggunakan kembali air sesuai dengan ketersediaan lokal.
		Limbah	Mengurangi, mendaur ulang, serta mengelola limbah agar tidak mencemari lingkungan.
		Transportasi	Mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, menyediakan alternatif transportasi (berjalankaki, sepeda, <i>shuttle</i>).
2.	Sosial dan Ekonomi	Tata guna lahan dan status kepemilikan	Memastikan legalitas, kesesuaian tata ruang, dan kepatuhan terhadap regulasi.
		Privasi dan interaksi sosial	Menyeimbangkan kebutuhan privasi dengan kesempatan interaksi sosial antar pengunjung.
		Fasilitas aksesibel	Menyediakan fasilitas yang dapat diakses semua orang, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan.
		Keamanan dan keselamatan	Melindungi pengunjung dari potensi bahaya fisik, sosial, maupun lingkungan.
		Interaksi komunitas dan ekonomi	Memberikan manfaat sosial dan ekonomi kepada masyarakat lokal melalui keterlibatan dan kerja sama.
		Kebutuhan ruang	Menyediakan ruang sesuai fungsi dan kapasitas tanpa berlebihan.
		Kesehatan	Menjamin kualitas udara, pencahayaan, dan sanitasi yang mendukung kesehatan pengunjung.

		Komunikasi	Menyediakan akses komunikasi (telepon, internet, informasi) yang memadai.
3.	Budaya	Tradisi dan budaya masyarakat adat	Menghormati, melindungi, dan menampilkan nilai budaya lokal secara otentik.
		Sejarah dan tradisi non-adat	Mengintegrasikan sejarah serta tradisi lain tanpa menghilangkan nilai lokal.
4.	Pengalaman	Estetika	Merancang agar bangunan menyatu dengan lanskap dan tidak mendominasi lingkungan visual.
		Respon emosional	Menciptakan pengalaman yang autentik dan emosional (<i>sense of place, storytelling, pemandangan, suasana kedatangan</i>).

Sumber: Dimodifikasi dari South Australian Tourism Commission, 2007

2.2.2. Global Sustainable Tourism Council

GSTC atau Global Sustainable Tourism Council adalah sebuah organisasi internasional yang mengembangkan standar, panduan, dan kriteria untuk pariwisata berkelanjutan secara global. Pada tahun 2007, GSTC diinisiasi oleh Rainforest Alliance, United Nations Environment Programme (UNEP), United Nations Foundation (UN Foundation), dan United Nations World Tourism Organization (UNWTO) beserta 32 mitra terkemuka dari industri pariwisata dengan misi menjadi agen perubahan dalam sektor perjalanan dan pariwisata berkelanjutan dengan cara mendorong peningkatan, pemahaman, penerapan, serta kebutuhan terhadap praktik pariwisata berkelanjutan.

Panduan yang dikembangkan ini disebut sebagai *GSTC Standards* yang tersusun dalam 4 pilar utama: pengelolaan berkelanjutan, dampak sosial-ekonomi, dampak budaya, dan dampak lingkungan. Dengan tujuan penyamaan persepsi mengenai pariwisata berkelanjutan secara global, *GSTC Standards* disusun berdasarkan pertimbangan beragam pedoman dari setiap benua dengan mengacu kepada ISEAL (*International Social and Environmental Accreditation and Labelling*) *Code of Good Practice for Sustainability Systems*. *GSTC Standards* kemudian terspesifikasi lagi menjadi 4 set berikut:

- a. *GSTC Destination Standard*: ditujukan untuk para pembuat kebijakan publik dan pengelola destinasi mengenai standar minimum yang harus dipenuhi suatu destinasi wisata.

- b. *GSTC Industry Standard*: ditujukan untuk industri pariwisata, seperti hotel dan biro jasa perjalanan wisata.
- c. *GSTC MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) Standard*: ditujukan untuk *venue, event organizers*, dan pameran.
- d. *GSTC Attraction Standard*: ditujukan untuk pengelolaan berkelanjutan pada atraksi wisata, seperti taman hiburan, museum, dan taman nasional.

(Global Sustainable Tourism Council, 2025)

Berikut adalah isi dari indikator pariwisata berkelanjutan berdasarkan *GSTC Attraction Criteria/Standard* yang relevan dalam proses perancangan wisata:

Tabel 2.2 Indikator Pariwisata Berkelanjutan (GSTC Attraction Criteria)

No.	Kategori	Aspek yang Dinilai	Indikator Pokok
1.	Pengelolaan Berkelanjutan	Sistem manajemen keberlanjutan	Adanya dokumen dan target keberlanjutan (lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, risiko, krisis) serta pemantauan berkelanjutan.
		Kepatuhan hukum	Patuh pada peraturan kesehatan, keselamatan, lingkungan, hak pekerja, dan kesejahteraan satwa.
		Ketutsertaan staff dan pengunjung	Pelatihan staff, sistem umpan balik pengunjung, keterlibatan pemangku kepentingan.
		Informasi dan promosi	Informasi jelas tentang budaya, alam, dan perilaku yang pantas; promosi jujur dan transparan.
		Perencanaan dan infrastruktur	Perencanaan tapak ramah lingkungan, material lokal, akses untuk semua, pengelolaan volume pengunjung.
2.	Sosial dan Ekonomi	Dukungan komunitas lokal	Dukungan pendidikan, kesehatan, usaha kecil, dan infrastruktur.
		Pekerjaan dan usaha lokal	Memprioritaskan tenaga kerja lokal, peluang usaha lokal, serta rantai pasokan berkelanjutan.

		Hak pekerja	Kesetaraan, tidak diskriminatif, kondisi kerja layak, upah adil, keselamatan kerja.
		Etika dan perlindungan	Kebijakan anti-eksploitasi, anti-perdagangan manusia, kode etik untuk staff dan pengunjung.
3.	Warisan Budaya	Interaksi budaya	Melibatkan komunitas lokal dan adat dalam interpretasi budaya, menghormati tradisi.
		Perlindungan warisan budaya	Mendukung pelestarian situs arkeologi, budaya, dan spiritual; tidak menghalangi akses lokal.
		Presentasi budaya	Mencerminkan budaya lokal, secara autentik pada desain, kuliner, pertunjukan, souvenir.
		Artefak	Tidak memperjualbelikan artefak ilegal, edukasi tentang pentingnya pelestarian.
4.	Lingkungan	Konservasi sumber daya	Efisiensi energi, air, penggunaan material lokal dan berkelanjutan.
		Pengurangan polusi	Pengelolaan emisi karbon, transportasi ramah lingkungan, limbah cair dan padat, zat berbahaya.
		Keanekaragaman hayati	Perlindungan ekosistem dan habitat, mencegah spesies invasif, interaksi satwa liar yang bertanggung jawab.
		Kesejahteraan satwa	Standar tinggi dalam perawatan satwa, larangan eksploitasi, kepatuhan regulasi.
		Perdagangan satwa liar	Tidak ada perdagangan ilegal, berbasis konservasi bila ada pemanfaatan.

Sumber: Dimodifikasi dari Global Sustainable Tourism Council, 2025

2.3. Konsep Mikro-Intervensi Arsitektur

Konsep mikro-intervensi arsitektur berangkat dari pemahaman bahwa setiap pembangunan pada dasarnya akan menimbulkan perubahan terhadap lingkungan. Semakin besar tingkat intervensi yang dilakukan terhadap tapak, maka semakin besar pula potensi gangguan yang dapat terjadi terhadap kualitas lingkungan setempat, seperti

perubahan topografi, berkurangnya vegetasi, terganggunya siklus hidrologi, serta menurunnya kualitas habitat. Oleh karena itu, pendekatan mikro-intervensi menekankan upaya untuk memenuhi kebutuhan fungsi wisata melalui tingkat intervensi yang seminimal mungkin, sehingga dampak negatif yang ditimbulkan terhadap lingkungan juga dapat turut diminimalkan. Sehingga, dalam pemahaman konsep ini, baik dan tidaknya desain tidak diukur dari besarnya pembangunan yang dilakukan, melainkan dari kemampuannya memenuhi kebutuhan pengguna dengan gangguan/perubahan sekecil mungkin terhadap kondisi alam eksisting.

Adapun beberapa karakteristik yang tergolong sesuai dengan konsep mikro-intervensi arsitektur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Gangguan fisik minimal terhadap tapak.

Mengusung prinsip intervensi minimum yang diangkat dalam teori *Reducing Architecture* oleh Enia dan Martella (2019), yaitu strategi yang menolak pendekatan *tabula rasa* yang merusak atau meratakan lanskap eksisting. Sebaliknya, desain dilakukan dengan menerapkan modifikasi seminimal mungkin sebagai bentuk penghormatan tertinggi terhadap integritas ekologis tapak alami. Teori ini mengutamakan pendekatan yang berorientasi pada relasi objek arsitektur dengan tapak dengan upaya seperti minimisasi pembangunan, penggunaan ulang, serta pembongkaran elemen arsitektur yang kehadirannya merugikan bagi suatu tapak.

2. Intervensi terlokalisasi dan tepat sasaran.

Intervensi dilakukan pada elemen atau area spesifik yang memiliki pengaruh ekologis paling signifikan, tanpa melakukan perubahan besar terhadap keseluruhan kawasan. Dapat diartikan pula strategi diterapkan pada elemen tertentu pada bangunan sesuai tujuan isu keberlanjutan. Karakteristik ini mengadopsi prinsip *urban acupuncture* yang dipaparkan oleh Casprini dkk. (2025), di mana penataan ruang difokuskan pada bentuk intervensi yang terlokalisasi dan terarah untuk mendapatkan dampak positif yang dapat meluas ke skala yang lebih besar atau keseluruhan. Melalui pendekatan ini, aspek keterbatasan sumber daya, seperti biaya dan waktu, dapat teratasi sesuai kondisi dan lebih efektif. Strategi mikro-intervensi akan berfokus pada penerapan secara fleksibel pada komponen arsitektural tertentu yang paling relevan dengan isu keberlanjutan setempat.

3. Kompensasi dan regenerasi ekologis.

Dalam proses perancangan hingga pembangunan, dampak ekologis akan selalu ada dan tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, harus ada kompensasi yang setara atau lebih baik. Berdasarkan paradigma *Regenerative Design* oleh Mang dan Reed (2012), pendekatan arsitektur hijau konvensional dinilai tidak lagi memadai karena hanya berfokus pada upaya mitigasi dampak atau hanya mengejar *net neutral*. Strategi mikro-intervensi arsitektur tidak mengejar desain yang hanya memperlambat laju

kerusakan lingkungan, sebaliknya perancangan arsitektur diarahkan untuk mengembalikan fungsi ekosistem dan bahkan menyatukan kembali aktivitas manusia sebagai bagian dari ekosistem alam. Upaya yang dilakukan akan mengarah ke penyelarasan kembali elemen buatan manusia dengan proses kehidupan alami sehingga terjadi evolusi bersama (*co-evolution*) yang saling menguntungkan antara bangunan wisata dan ekosistem setempat.

